

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE. Buka Forum Perangkat Daerah untuk Penyusunan RKPD Tahun 2026

Nunukan, 17 Maret 2025; Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai V Kantor Bupati Nunukan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos , Anggota DPRD Nunukan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, serta seluruh perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nunukan. Forum ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang telah diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI.

Latar Belakang

Penyusunan RKPD merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. RKPD menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan bagi seluruh OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Proses penyusunan RKPD 2026 ini didasarkan pada hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, di mana aspirasi masyarakat telah dihimpun dan diinput ke dalam aplikasi SIPD RI. Selain itu, RKPD juga harus selaras dengan 17 prioritas pembangunan daerah, visi misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagai pedoman pembangunan nasional.

Tujuan

Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk:

1. Menyusun RKPD 2026 yang komprehensif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan selaras dengan 17 prioritas pembangunan daerah, visi misi Bupati, serta Asta Cita Presiden.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-OPD dalam merumuskan rencana pembangunan yang terintegrasi.
4. Menindaklanjuti hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang telah diinput dalam aplikasi SIPD RI.

Fungsi

Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan konsultasi bagi seluruh OPD untuk:

1. Mengevaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya.
2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2026.
3. Memastikan keselarasan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Manfaat

Adapun manfaat dari penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah ini adalah:

1. **Meningkatkan Partisipasi Publik:** Dengan menindaklanjuti hasil Musrenbang, forum ini memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan.
2. **Mewujudkan Pembangunan yang Terarah:** RKPD 2026 yang disusun akan menjadi peta jalan pembangunan yang jelas dan terukur.
3. **Meningkatkan Sinergi Antar-OPD:** Forum ini menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-OPD dalam mencapai target pembangunan.
4. **Mendukung Pembangunan Nasional:** Dengan menyelaraskan RKPD dengan Asta Cita Presiden, pembangunan di Nunukan akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pernyataan Bupati Nunukan

Dalam sambutannya, Bupati H. Irwan Sabri menegaskan pentingnya penyusunan RKPD 2026 yang berfokus pada 17 prioritas pembangunan daerah. Beliau juga menekankan bahwa perencanaan ini harus selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, serta sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

“Penyusunan RKPD 2026 ini harus mencerminkan komitmen kita untuk membangun Nunukan yang lebih maju dan sejahtera. Kita memiliki 17 prioritas pembangunan daerah yang harus menjadi fokus utama. Selain itu, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan harus selaras dengan visi misi kami sebagai pemimpin daerah dan mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden,” ujar Bupati Irwan Sabri.

Bupati juga mengapresiasi partisipasi aktif seluruh pihak dalam proses Musrenbang tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurutnya, hasil Musrenbang yang telah diinput dalam aplikasi SIPD RI menjadi dasar yang sangat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

“Hasil Musrenbang yang telah kita input dalam SIPD RI adalah suara masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari pembangunan yang partisipatif, di mana aspirasi masyarakat menjadi landasan dalam

menentukan arah pembangunan daerah. Kita harus memastikan bahwa RKPD 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Nunukan,” tambahnya.

Kolaborasi dan Sinergi Antar-OPD

Wakil Bupati Nunukan, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar-OPD dalam menyusun RKPD. “Kita harus bekerja sama secara sinergis untuk memastikan bahwa RKPD 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan di Nunukan. Kolaborasi dan koordinasi antar-OPD menjadi kunci keberhasilan kita,” ujarnya.

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, dalam paparannya, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketersediaan anggaran, potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi. “Kita harus realistis dalam menyusun rencana ini, namun tetap optimis untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Peran DPRD Nunukan

Anggota DPRD Nunukan yang hadir dalam forum tersebut juga memberikan masukan dan arahan terkait prioritas pembangunan daerah. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Nunukan.

Penutup

Bupati Irwan Sabri menutup sambutannya dengan pesan agar seluruh pihak bekerja keras dan bersinergi untuk mewujudkan Nunukan yang lebih maju dan sejahtera. “Mari kita bersama-sama bekerja keras dan bersinergi untuk mewujudkan Nunukan yang lebih baik. RKPD 2026 adalah peta jalan kita, dan saya yakin dengan komitmen dan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai target pembangunan yang telah kita tetapkan,” pungkash Bupati Irwan Sabri.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi dan pembahasan teknis oleh seluruh OPD terkait, sebagai langkah awal dalam penyusunan RKPD 2026 yang akan menjadi acuan pembangunan Kabupaten Nunukan di tahun mendatang. Dengan diselenggarakannya forum ini, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Nunukan.